



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 042/V/KIBANTEN-PS/2016

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 042/V/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Burhanudin

Alamat : Talagasari RT/RW 013/001 Desa Talagasari Kec. Cikupa  
Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten  
Tangerang

Alamat : Gedung Usaha-usaha Daerah Lantai IV Komplek Perkatoran  
Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 16 Mei 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 18 Mei 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 042/V/KIBANTEN-PS/2016.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 01 Maret 2016, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang melalui surat nomor: 18/III/2016. berdasarkan tanda terima diterima pada tanggal 02 Maret 2016. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Salinan Realisasi Penerimaan dan Alokasi Anggaran Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dari APBN, APBD Prov. Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu:
  - a. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Perkegiatan serta dokumen pendukungnya.
  - b. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta dokumen pendukungnya.
  - c. Rencana anggaran biaya (RAB), pembelanjaan untuk Belanja Modal, Barang dan Jasa serta dokumen pendukungnya;
  - d. Alokasi Anggaran untuk kegiatan perjalanan Dinas serta dokumen pendukungnya
  - e. Biaya pendidikan dan pelatihan serta dokumen pendukungnya
  - f. Biaya Perawatan kendaraan serta dokumen pendukung dan copy kwitansinya;
  - g. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya.
  - h. Laporan Keuangan serta dokumen pendukungnya.

2. Rencana alokasi anggaran tahun 2016 dari APBN, APBD Prov. Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu Jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB),

Belanja Modal, Barang dan Jasa serta Kegiatan Perjalanan Dinas, Biaya Perawatan Kendaraan, Biaya Pendidikan beserta dokumen Pendukungnya.

[2.3] Pada tanggal 07 Maret 2016, Termohon menyampaikan jawaban permohonan informasi kepada Pemohon melalui surat nomor : 000/118-1-Disporabudpar yang pada pokok intinya menyampaikan bahwa sebagian informasi yang diminta Pemohon dapat dilihat melalui website kabupaten tangerang dan sebagian informasi belum dapat dipenuhi karena masih dalam proses pemeriksaan BPK.

[2.4] Pada tanggal 28 Maret 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pembantu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang melalui surat nomor: 25/III/2016, dan diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 16 Mei 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 18 Mei 2016, Permohonan diregister.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

#### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*

Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 280/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk Pemohon dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 281/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 pukul 13.30 WIB dengan agenda Sidang Pemeriksaan.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 03 Agustus 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Dra. Ratih Rahmawati, Dra. Hj. Leli Yuliatwati dan Mohamad Tarlan, S.Sos berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/474-Disporabudpar/2016 yang ditandatangani oleh Drs. H. Syaifullah, MM tertanggal 02 Agustus 2016 sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, maka Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Para Pihak kembali untuk hadir pada hari Rabu 10 Agustus 2016 Pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 293/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk Pemohon dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 294/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 10 Agustus 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Dra. Hj. Leli Yuliatwati dan Mohamad Tarlan, S.Sos berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/474-Disporabudpar/2016 yang ditandatangani oleh Drs. H. Syaifullah, MM tertanggal 02 Agustus 2016 sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 042/V/KIBANTEN-PS/2016 gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Rohimah)

Panitera Pengganti


(Hujaji)